

BAB I

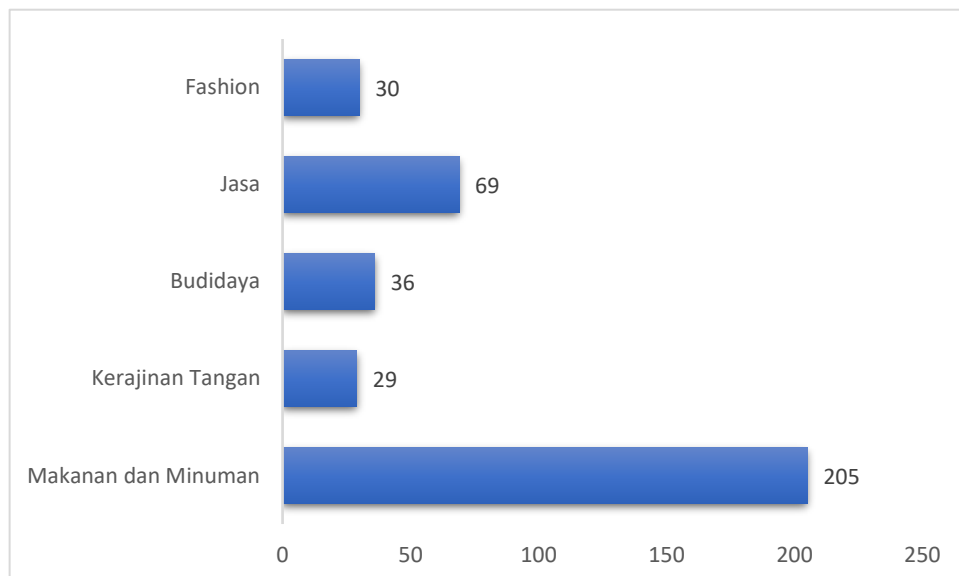
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Di Indonesia, UKM memberikan kontribusi sebesar 60% dari total pendapatan negara dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sebagaimana tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini menunjukkan bahwa UKM menjadi sektor strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perkembangan dan tuntutan global mengenai pembangunan berkelanjutan, UKM diharuskan melakukan perubahan dalam hal kapasitas dan inovasi serta dalam praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan ekonomi sirkular. Selain itu, keberhasilan perubahan UKM dipengaruhi oleh modal sosial, tingkat kesadaran lingkungan dan dukungan pemerintah sebagai penggerak dan fasilitator kebijakan.

Kabupaten Kuningan adalah salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar untuk pengembangan keberlanjutan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Menurut data dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan, jumlah unit UKM terus bertambah dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Namun, sebagian besar UKM di wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan karena keterbatasan pemahaman, akses teknologi dan sumber daya. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat penting sebagai pendamping dan penyedia kebijakan yang mendukung perubahan UKM yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Kuningan, UKM yang terdaftar mencapai angka 369 unit. Dari jumlah tersebut dikategorikan ke dalam beberapa bidang usaha seperti makanan dan minuman, kerajinan, budidaya, jasa dan fashion. Peningkatan jumlah UKM ini menunjukkan bahwa sektor UKM di Kabupaten Kuningan mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk mendorong UKM agar mengikuti trend global yaitu menjadi agen perubahan dalam penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan. Berikut grafik yang menggambarkan distribusi UKM di Kabupaten Kuningan.



Sumber : Diskopdagperin Kabupaten Kuningan, 2023

Gambar 1. 1 Distribusi Jenis usaha pada UKM di Kabupaten Kuningan

Berdasarkan gambar 1.1 sebanyak 205 usaha UKM di Kabupaten Kuningan menjalankan bisnis di bidang makanan dan minuman, jenis usaha lainnya, seperti jasa sebanyak 69 usaha, budidaya 36 usaha, fashion 30 usaha dan kerajinan tangan 29 usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa UKM memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian lokal melalui penyediaan lapangan kerja dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.

Dengan semakin berkembangnya jumlah dan peran UKM penerapan praktik keberlanjutan menjadi faktor yang sangat penting karena dapat membantu UKM tetap berkontribusi dalam perekonomian daerah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. UKM dapat menerapkan praktik keberlanjutan dengan mengelola limbah secara efisien dan menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Langkah-langkah ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing usaha, karena semakin banyak pelanggan yang lebih peduli terhadap produk dan layanan yang berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, UKM di Kabupaten Kuningan masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan keberlanjutan. Banyak usaha yang belum menerapkan prinsip bisnis yang ramah lingkungan, seperti pembuangan limbah yang kurang optimal dan penggunaan bahan baku yang tidak ramah lingkungan, masih banyak ditemukan dalam operasi bisnis. Selain itu, kurangnya akses modal dan teknologi untuk melakukan inovasi dalam teknologi yang ramah lingkungan. Selain keterbatasan modal dan teknologi, pemahaman pelaku atau pengelola usaha mengenai konsep keberlanjutan, seperti daur ulang dan efisiensi bahan baku masih rendah. Masih sedikit karyawan yang mendapatkan pelatihan tentang praktik bisnis yang berkelanjutan, yang mengakibatkan penerapan keberlanjutan di tingkat operasional menjadi sulit.

Di sisi lain, kurangnya informasi mengenai regulasi pemerintah yang mendukung keberlanjutan dan prosedur yang rumit, menghambat akses terhadap fasilitas pendukung keberlanjutan, seperti subsidi, insentif pajak dan bantuan modal. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, UKM bisa mengalami kesulitan dalam meningkatkan daya saing di era tren bisnis global yang sudah mengarah pada praktik keberlanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran, akses

modal dan inovasi dalam usaha menengah agar dapat berubah dengan model bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada 30 Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kuningan menghasilkan data sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Hasil Survei Awal

No	Nama UKM	Pertumbuhan Keuangan	Pertumbuhan Strategi	Pertumbuhan Struktural	Pertumbuhan Organisasi
1	Keripik Pisang	x	x	x	✓
2	Budidaya Jamur	x	✓	✓	✓
3	Kue Kering	x	x	x	x
4	Produksi Bawang Goreng	✓	x	✓	✓
5	Produksi Urung Kupat	✓	x	x	x
6	Produksi Tahu	x	x	x	✓
7	Penyulingan Minyak Cengkeh	✓	✓	✓	✓
8	Produksi Gorden	x	x	✓	x
9	Bengkel Motor Samudra	x	x	✓	✓
10	Produksi Hijab	✓	x	✓	x
11	Varisha Yogurt	x	✓	x	✓
12	Kelapa Parut	x	x	x	x
13	Produksi Tempe	x	x	x	✓
14	Kripik Singkong	x	x	x	x
15	Rengginang	✓	x	✓	x

16	Produksi Kayu	X	x	✓	✓
17	Penggilingan Tepung	X	x	x	X
18	Produksi Kerupuk	✓	x	x	✓
19	Produksi Boneka	✓	x	✓	X
20	Produksi kerupuk tahu	✓	x	✓	X
21	Pabrik Tahu	X	x	x	✓
22	Produksi Kripik Gemblong	X	✓	x	X
23	Produksi Kremes	✓	x	x	✓
24	Produksi Kripik Mangleng	X	x	x	X
25	Bengkel Las	✓	x	✓	x
26	Meubel	X	✓	x	X
27	Produksi Donat	✓	x	x	X
28	Produksi Kerupuk Metal	X	✓	x	X
29	Produksi Dimsum	X	x	x	X
30	Konveksi	✓	x	x	X

Sumber : Data Survei Penulis 2024

Keterangan :

✓ = **Sudah Dilakukan**

X = **Belum Dilakukan**

Berdasarkan hasil survei awal pada tabel 1.1 yang dilakukan pada 30 pelaku UKM di Kabupaten Kuningan, menunjukkan bahwa penerapan praktik keberlanjutan masih belum diterapkan dengan baik. Hasil Survei menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UKM yang belum menerapkan praktik keberlanjutan. Sebagian besar hanya memenuhi satu atau dua

indikator bahkan ada beberapa yang tidak memenuhi satupun dari keempat aspek tersebut. Ada 18 pelaku UKM yang belum menerapkan indikator keberlanjutan dalam aspek keuangan, 24 UKM belum memiliki strategi yang jelas untuk keberlanjutan bisnisnya, dan 19 UKM yang belum mengatur struktur manajemen dengan baik serta ada 20 UKM yang belum menerapkan prinsip keberlanjutan dalam budaya dan pengelolaan sumber daya manusia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku UKM terhadap pentingnya keberlanjutan usaha. Banyak pelaku UKM masih fokus pada operasional jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bisnisnya sendiri dan lingkungan sekitar. Minimnya penerapan praktik keberlanjutan menunjukkan bahwa pelaku UKM belum secara maksimal menerapkan cara kerja yang efisien, adaptif, dan bertanggung jawab di tengah perubahan zaman. Meningkatnya tekanan persaingan, perubahan pola konsumsi dan tuntutan terhadap praktik usaha yang lebih ramah lingkungan, UKM dituntut untuk mampu menyesuaikan agar tetap relevan dan meningkatkan daya saing. Keberlanjutan bukan soal menjaga lingkungan, tetapi tentang bagaimana usaha dapat dikelola secara strategis dan bertanggung jawab agar mampu bertahan dalam jangka panjang.

Pentingnya pembinaan dan dukungan dari berbagai pihak ditunjukkan oleh fakta bahwa aspek-aspek keberlanjutan tersebut tidak diterapkan oleh sebagian besar UKM. Dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan dan komunitas lokal sangat dibutuhkan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, akses informasi dan bantuan teknis dan finansial, agar para pelaku UKM terdorong untuk mulai menerapkan prinsip keberlanjutan usaha secara lebih terstruktur. Dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak UKM di Kabupaten Kuningan dapat berkembang secara sehat dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk kemajuan ekonomi lokal dan tetap mampu bertahan ditengah perubahan pasar dan tantangan

lingkungan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang dapat mendorong pelaku UKM agar mampu menerapkan praktik keberlanjutan.

Praktik keberlanjutan adalah konsep yang mencakup pola konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang memastikan kelestarian lingkungan sekaligus kesejahteraan sosial dan ekonomi (Ardianto et al., 2024). Beberapa penelitian sebelumnya telah menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi penerapan praktik keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Nafisah et al., (2023) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik keberlanjutan yaitu *social capital*, *business digitalization* dan pemanfaatan *e-marketing*. Menurut penelitian Alfarizi (2023) ekonomi sirkular, model bisnis inovatif dan dukungan anggaran merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi praktik keberlanjutan.

Menurut Wijaya et al., (2022) faktor yang mempengaruhi praktik keberlanjutan yaitu pengetahuan lingkungan, persepsi dan perilaku. Selain itu, menurut penelitian Kasim et al., (2024) faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan praktik keberlanjutan dipengaruhi oleh literasi keuangan dan sistem manajemen berbasis digital. Lebih lanjut menurut Talahi & Ie (2024) menyebutkan bahwa dukungan pemerintah berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh faktor-faktor lain dalam penerapan praktik keberlanjutan. Oleh karena itu, menurut peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan praktik keberlanjutan adalah ekonomi sirkular, modal sosial, dan kesadaran lingkungan. Dukungan pemerintah juga dilibatkan sebagai variabel moderasi yang diperkirakan dapat memperkuat pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap praktik keberlanjutan UKM di Kabupaten Kuningan.

Ekonomi sirkular merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada model bisnis yang menggantikan konsep 'akhir masa pakainya' dengan mengurangi , sebagai alternatif menggunakan kembali, mendaur ulang dan memulihkan bahan dalam proses produksi/distribusi dan konsumsi, dengan tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yang menyiratkan penciptaan kualitas lingkungan (Rehman et al., 2022). Penelitian mengenai ekonomi sirkular terhadap penerapan praktik keberlanjutan menunjukkan hasil yang beragam, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mumtaz Siregar et al., (2025) ekonomi sirkular berpengaruh positif terhadap keberlanjutan di sektor UMKM. Penelitian lain juga menghasilkan hal yang sama yaitu ekonomi sirkular berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha (Lubis & Faridy, 2024) (Qanita et al., 2024)(Lumbanraja & Lumbanraja, 2022). Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarif Agustin & Rianingrum, (2021) Fadhillah & Fahreza, (2023) yang menyatakan bahwa ekonomi sirkular di sektor UKM masih banyak yang terkendala akan sumber daya bahkan tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UKM.

Social Capital atau Modal Sosial merupakan aset yang dimiliki oleh suatu komunitas dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memungkinkan dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang bersifat harmonis dan kondusif (Nafisah et al., 2023). Penelitian mengenai modal sosial terhadap penerapan praktik keberlanjutan menunjukkan hasil yang beragam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini et al., (2024) menghasilkan bahwa modal sosial berpengaruh positif terhadap keberlanjutan bisnis. Penelitian lain juga menghasilkan hal yang sama yaitu modal sosial berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha (Yolanda & Erni, 2022) (Nafisah et al., 2023) (Fu'adi & Anisa, 2022) (Replita et al., 2024). Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulpicha & Slamet (2019) Pardiman et al., (2022) menyatakan bahwa modal sosial terdiri dari jaringan pribadi,

profesional, asosiasi, dan institusi, tetapi dari keempat variabel tersebut menunjukkan bahwa jaringan pribadi tidak signifikan terhadap keberlanjutan bisnis.

Kesadaran lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami hubungan antara aktivitas manusia, status kualitas lingkungan saat ini dan kesediaannya untuk mengambil bagian dalam kegiatan lingkungan (Listiana & Fakhri, 2020). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran lingkungan dapat mendorong usaha untuk mengadopsi praktik keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Noer et al., (2024) menemukan bahwa pelatihan mengenai prinsip-prinsip penerapan praktik keberlanjutan di kalangan pelaku usaha di Surabaya secara signifikan meningkatkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan bisnis. Penelitian menyebutkan bahwa pemahaman akan kesadaran lingkungan para pelaku usaha berpengaruh signifikan akan implementasi praktik keberlanjutan (Ananta et al., 2024); (Famiola & Wulansari, 2020) (Ario et al., 2024) (Ismanto et al., 2024).

Di sisi lain, beberapa penelitian menemukan bahwa kesadaran lingkungan tidak selalu berpengaruh terhadap praktik keberlanjutan usaha. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Poerwanto et al., (2021) Prayogi et al., (2021), Yadav et al., (2018) menunjukkan bahwa meskipun banyak pelaku UMKM yang menyadari pentingnya kesadaran lingkungan akan keberlanjutan, penerapannya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal modal dan akses teknologi.

Karena adanya inkonsistensi hasil penelitian, dimana banyak yang menyimpulkan bahwa variabel ekonomi sirkular, modal sosial dan kesadaran lingkungan berpengaruh positif terhadap variabel penerapan praktik keberlanjutan dan ada juga yang banyak menyatakan bahwa variabel ekonomi sirkular, modal sosial dan kesadaran lingkungan berpengaruh negatif terhadap penerapan praktik keberlanjutan, maka dalam penelitian ini

ditambahkan variabel moderasi yaitu dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah merupakan peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan (Talahi & Ie, 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dapat memoderasi praktik keberlanjutan bisnis seperti yang dilakukan oleh penelitian (Ananda Intan Sari et al., 2022), (Fitriana et al., 2024), (Mamash et al., 2025) dan (Azis & Senimantara, 2023). Namun, ada penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah tidak dapat memoderasi praktik keberlanjutan usaha seperti yang dilakukan oleh (Talahi & Ie, 2024), (Suprayitno et al., 2025).

Berdasarkan fenomena dan resaerch gap, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Ekonomi Sirkular, Modal Sosial, Kesadaran Lingkungan Terhadap Penerapan Praktik Keberlanjutan Pada UKM Di Kabupaten Kuningan Dengan Dukungan Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ekonomi sirkular berpengaruh terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM ?
2. Apakah modal sosial berpengaruh terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM ?
3. Apakah kesadaran lingkungan berpengaruh terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM ?
4. Apakah dukungan pemerintah berpengaruh terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM ?
5. Apakah dukungan pemerintah dapat memoderasi pengaruh ekonomi sirkular terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM ?

6. Apakah dukungan pemerintah dapat memoderasi pengaruh modal sosial terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM ?
7. Apakah dukungan pemerintah dapat memoderasi pengaruh kesadaran lingkungan terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memperoleh fakta secara empiris untuk menghasilkan model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh ekonomi sirkular terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM.
2. Pengaruh modal sosial terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM.
3. Pengaruh kesadaran lingkungan terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM.
4. Pengaruh dukungan pemerintah terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM.
5. Dukungan pemerintah memoderasi pengaruh ekonomi sirkular terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM.
6. Dukungan pemerintah memoderasi pengaruh modal sosial terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM.
7. Dukungan pemerintah memoderasi pengaruh kesadaran lingkungan terhadap penerapan praktik keberlanjutan UKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul “Pengaruh Ekonomi Sirkular, Modal Sosial, Kesadaran Lingkungan Terhadap Penerapan Praktik Keberlanjutan Pada UKM Di Kabupaten Kuningan Dengan Dukungan Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi” diharapkan memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang akuntansi sosial

lingkungan. Selain itu, penelitian ini berperan dalam memperdalam wawasan terkait faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan praktik keberlanjutan, khususnya pada UKM. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi dan peneliti dimasa mendatang yang tertarik mengeksplorasi lebih lanjut terkait akuntansi sosial lingkungan, baik di UKM maupun sektor bisnis lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti : penelitian ini menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penerapan praktik keberlanjutan UKM.
- b. Bagi UKM : hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pelaku usaha dalam menerapkan praktik keberlanjutan, termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Dengan memahami pentingnya keberlanjutan, bisa meningkatkan daya saing usaha dan menarik lebih banyak pelanggan yang peduli lingkungan.
- c. Bagi Pemerintah Daerah : diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Kuningan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong keberlanjutan usaha.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya : penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang keberlanjutan UKM. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut, terutama untuk menguji variabel lain yang mempengaruhi praktik keberlanjutan seperti, peran teknologi, budaya organisasi atau kebijakan pemerintah.